

# PANDEMI COVID-19 DAN “CREDIT CRUNCH”

No. 01/06  
2020

SERIAL BERBAGI

Krisna Wijaya

Mengapa *credit crunch* perlu mendapatkan perhatian, sebagai langkah antisipasi. Tentunya akan lebih baik disediakan payung sebelum hujan. Jangan sampai disediakan payung ketika hujan berakhir. Payungnya tetap bisa digunakan, tetapi manfaatnya tidak optimal.

Pengeluaran stimulus bisa saja terjadi pada waktu yang salah karena keterlambatan dalam mengidentifikasi dan mengalokasikan dana

Berdasarkan pengalaman disemua negara, maka ketika mengalami gangguan perekonomian, salah satu solusinya adalah melakukan program stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi adalah penggunaan perubahan kebijakan moneter atau fiskal untuk memulai pertumbuhan selama resesi. Pemerintah dapat mencapai ini dengan menggunakan taktik misalnya seperti menurunkan suku bunga, meningkatkan pengeluaran pemerintah, dan pelonggaran berbagai kebijakan (Adam Hayes, 2020).

Stimulus memang alternatif terbaik, meskipun mengundang kritik. Menurut John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris dari awal abad ke-20, program stimulus agak kontroversial. Keynes berpendapat bahwa stimulus ekonomi, kadang-kadang disebut sebagai tindakan kontra-siklus. Kritikan itu didasari teori ekonomi pada umumnya, bahwa selama masa pengangguran yang tinggi, pemerintah harus mengambil kebijakan defisit belanja untuk meningkatkan stimulan terhadap permintaan. Peningkatan permintaan tersebut secara teoritis akan meningkatkan tingkat pertumbuhan, dan diharapkan akan mengurangi pengangguran.

Meskipun Keynes berpendapat seperti dengan nada mengkritik, akan tetapi ada semacam argumen tambahan yang menyetujui adanya stimulus ekonomi. Kelompok ini mempunyai keyakinan bahwa beberapa bentuk stimulus bisa jadi bermanfaat secara teori, tetapi serungkali ada tantangan secara praktis. Alasannya, pertama bahwa pengeluaran stimulus bisa saja terjadi pada waktu yang salah karena keterlambatan dalam mengidentifikasi dan mengalokasikan dana. Kedua, ada persepsi bahwa apabila pemerintah pusat tidak jeli dalam mengalokasikan dana stimulus, maka bisa saja program stimulus mengarah kepada

proyek yang termasuk boros. Tidak tepat sasaran sehingga akan menghasilkan tingkat pengembalian yang rendah.

Stimulus ekonomi tentu ada pro dan konsnya. Meskipun ada stimulus ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19, tentunya tidak serta merta kegiatan sektor riil akan segera normal kembali dalam waktu singkat. Setiap kebijakan ekonomi selalu ada jeda (*time lag*) antara kebijakan dengan hasilnya. Hdiyakini bahwa program stimulus ekonomi merupakan suatu keharusan. Tujuannya agar fokus untuk mengatasi dampak ekonomi. Intinya berkurangnya aktifitas maupun mobilitas terkait produksi, kecukupan konsumsi harus tetap terjamin.

### **Dampak Pandemi**

Kelesuan perekonomian tentunya akan berdampak bagi lembaga keuangan seperti bank dan lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, lembaga keuangan (LK) akan mengalami kondisi apa yang disebut sebagai *credit crunch*. Pemahaman *credit crunch* secara praktis adalah terjadinya penurunan aktifitas pinjaman yang disebabkan karena LK mengalami kelangkaan sumber dananya.

Kelangkaan sumber dana bagi LK bisa berupa dana pihak ketiga (DPK) bagi bank, dan *line of credit* bagi lembaga pembiayaan lainnya. Kelangkaan tersebut bisa juga terjadi ketika harus meminjam dana dari luar negeri (*offshore loan*) untuk ekspansi kreditnya. Dilain pihak dalam kondisi krisis peningkatan sumber dana juga tidak bisa naik secara signifikan. Hal lain yang menyebabkan terjadinya *credit crunch* ketika bank dan lembaga pembiayaan lainnya memperketat persyaratan kreditnya. Permintaan syarat kredit yang ketat akan mengurangi permintaan kredit.

Apakah *credit crunch* akan terjadi? Sesekali tidak boleh diabaikan. Karena dalam setiap kerapuhan sistem keuangan berpotensi memicu krisis utang baru. Tentu dengan kondisi pandemi Covid-19 masing-masing negara akan membatasi pemberian kredit, sehingga bisa terjadi kelangkaan sumber dana secara global. Mengutip apa yang disampaikan John Plander (2020) dalam artikel pilihan Financial Times, bahwa akibat virus Corona (baca; Covid-19) akan meningkatkan prospek luar biasa krisis kredit di dunia.

Sekiranya *credit crunch* masih dalam tahapan perlu diwaspadai, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meminimalisir potensi terjadinya *credit crunch* antara lain sebagai berikut;

Pertama, agar Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dapat memberlakukan kembali skema penjaminan penuh (*blanket guaranteed*) seluruh simpanan di bank. Ini lebih banyak membantu untuk meningkatkan kepercayaan kepada para penyimpan dana di bank. Kepercayaan tersebut penting dan menjadi sangat berharga. Masyarakat semakin tenang karena simpanannya terjamin dan dijamin. Bagi kalangan perbankan tentunya akan lebih terjamin dari penarikan dana secara masif. Ide tidak populer juga bisa dilakukan dengan

Apakah *credit crunch* akan terjadi? Sesekali tidak boleh diabaikan. Karena dalam setiap kerapuhan sistem keuangan berpotensi memicu krisis utang baru. Tentu dengan kondisi pandemi Covid-19 masing-masing negara akan membatasi pemberian kredit, sehingga bisa terjadi kelangkaan sumber dana secara global.



penundaan pembayaran premi bagi bank. Minimal memberikan tambahan sumber dana, meskipun tidak seberapa.

Kedua, sementara bantuan likuiditas dan subsidi bunga belum memungkinkan, sebaiknya LK tetap memberikan layanan pembiayaan. Sebut saja sebagai gerakan melawan *credit crunch*. Bank Indonesia telah menurunkan giro wajib minimumnya (GWM) yang memungkinkan adanya kelonggaran tarik untuk ekspansi kredit. Hal ini sudah dilakukan oleh Bank Indonesia. Pertanyaannya untuk siapa kredit akan diberikan?

Kembali kepada pengalaman krisis baik tahun 1998 maupun tahun 2008, terbukti bahwa para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu tetap bertahan karena sebagian besar produknya terkait dengan kebutuhan keseharian. Ketika kelesuan ekonomi terjadi pada umumnya permintaan juga menurun. Tetapi hal yang terkait dengan permintaan kebutuhan pokok dapat dikatakan stabil.

Dengan kondisi saat ini, ada baiknya diberikan perlakuan khusus bagi UMKM dengan melakukan restrukturisasi kredit. Paketnya bisa mulai dari adanya *grace period* masa mulai mencicil kreditnya, pemberlakuan suku bunga khusus, dan memperpanjang jangka waktu pelunasannya. Paket semacam ini biasanya bagian dari fasilitas penyelesaian kredit bermasalah. Tentunya paket tersebut hanya opsi, sehingga diperlukan persyaratan tertentu agar tidak mengundang *moral hazard*.

Ketiga, meskipun sering dianggap kegiatan yang konsumtif, tetapi memberikan kontribusi keuntungan bagi bank. Misalnya kredit untuk kalangan berpenghasilan tetap dan pensiunan. Mereka adalah kalangan yang paling kecil kontribusinya terhadap *non performing loan*

(NPL). Saat ini mereka tidak ada kenaikan pendapatan dan bahkan mungkin THR saja belum tentu diperoleh, maka perlu dipertimbangkan adanya peningkatan limit kredit bagi mereka. Belum lagi adanya tambahan biaya dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 seperti membeli masker, pembersih tangan dan disinfektan. Andai saja ada *grace period*, maka akan meningkatkan daya tahan secara ekonomi bagi mereka.

### Beberapa Catatan

Meskipun Keynes memberikan kritik atas program stimulus ekonomi, ternyata ada beberapa argumen yang bertentangan dengan Keynes, termasuk perdebatan teoretis tentang "kesetaraan Ricardian" dan konsep *crowding out*. Ricardo berpendapat bahwa ada kecenderungan konsumen akan menghabiskan lebih sedikit pengeluarannya, apabila mereka percaya yakin bahwa suatu saat mereka akan membayar pajak masa depan yang lebih tinggi untuk menutupi defisit pemerintah. Meskipun bukti empiris untuk kesetaraan

Ricardian tidak jelas, itu tetap menjadi pertimbangan penting dalam keputusan kebijakan.

*Crowding out* adalah fenomena yang terjadi ketika kebijakan fiskal menyebabkan suku bunga meningkat, sehingga mengurangi investasi.

Misalnya ketika pemerintah sangat agresif mengeluarkan emisi obligasi ritel akan memicu kekhawatiran akan munculnya *crowding out*.

Fenomena semacam itu bisa terjadi karena emisi obligasi ritel oleh negara dapat menyedot dana investor hingga dana yang mengalir ke perbankan dan pasar keuangan menjadi menipis.

Konsep *crowding out*, mengundang kritik bahwa pengeluaran defisit pemerintah akan mengurangi investasi swasta dalam dua cara. Pertama, meningkatnya permintaan tenaga kerja akan meningkatkan upah, yang merugikan keuntungan bisnis. Kedua, defisit harus didanai dalam jangka pendek oleh utang, yang akan menyebabkan kenaikan suku bunga secara marginal.

Secara garis besar adanya stimulus ekonomi dalam rangka pandemi Covid-19 tetap diperlukan. Terbukti hampir sebagian besar melakukannya ketika terjadi pandemi Covid-19. Dengan perkataan lain akan tetap bermanfaat apabila dilakukan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Tidak ada politisasi dan pemanfaatan secara politis. Harus benar-benar ada pengawalan yang ketat agar manfaatnya menjadi optimal.

Beberapa pemikiran diatas tentunya hanya dalam bentuk ide saja. Masih banyak ide lainnya yang lebih bagus tentunya. Catatan singkat tersebut diatas lebih kepada upaya menyediakan payung sebelum hujan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Perrpu No.1/2020 dan PP (Peraturan Pemerintah) dengan berbagai skema yang secara teoritis sudah benar. Mengapa *credit crunch* perlu mendapatkan perhatian, sebagai langkah antisipasi. Tentunya akan lebih baik disediakan payung sebelum hujan. Jangan sampai disediakan payung ketika hujan berakhir. Payungnya tetap bisa digunakan, tetapi manfaatnya tidak optimal.

Krisna Wijaya adalah pengamat perbankan. Senior Fakulti di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPi). Dengan penyesuaian, artikel ini telah dimuat di Majalah Infobank, Edisi Juni 2020

